

**ANALISIS SISTEM PENERIMAAN KAS PADA KANTOR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG**

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN  
30/05/2022  
1 ea  
Sub-Alumni  
P/0310/AKT/2022  
IRF  
a

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2021**

**JUDUL PENELITIAN:  
ANALISIS SISTEM PENERIMAAN KAS PADA KANTOR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan Oleh :

**MUHAMMAD SEAN**

**NIM. 105731118416**



Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

"Yakin dan percaya adalah kunci dari segala permasalahan.

Dengan modal yakin akan menjadi obat penumbuh

semangat hidup" "Sure and believe is the key to all

problems

With capital, we are sure that it will be a medicine to grow  
enthusiasm for life



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Mansur S.pd dan Ibunda ku tercinta Yenang terima kasih atas segala kasih sayang yang berlimpah mulai dari saya terlahir ke dunia ini hingga saat ini, terima kasih atas segala limpahan doa yang tiada hentinya serta terima kasih atas pengorbanan yang telah engkau lakukan selama ini juga untuk saudara ku, adikku terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah kalian aturkan. Ku persembahkan sebuah tulisan yang ditulis diatas lembaran putih ini dan kurangkai kata demi kata dan kalimat yang diiringi berjuta doa dan makna kehidupan yang tak lain sebagai ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Dan juga sebagai bentuk warisan dari bapak dan ibuku meski bukan dalam bentuk materi tetapi sebuah pendidikan. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan Rahmat kehidupan untuk kita semua Amin.
2. Bapak dan ibu dosen, terkhusus untuk kedua pembimbingku yang selama ini dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberi arahan dalam menyelesaikan karya ini.
3. Para sahabat, teman-teman serta teman terbaik ku yang selalu memberi bantuan juga semangat dan dukungan dalam menyelesaikan karya ini.

Terima kasih.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : "Analisis sistim penerimaan kas pada kantor Pendapatan Daerah"

Nama Mahasiswa : **Muhammad Irfan**

No. Stambuk/ NIM : 105731110410

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah direvisi, diperiksa dan diuraikan didepan penitia penguji skripsi stara satu (S1) pada tanggal 31 Desember 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 27 Jumadil Awal H

31 Desember 2021 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Muchriana Muchran, SE, MSi., Ak.CA**  
NIDN 0930098801

**Samsul Rizal, SE., MM**  
NIDN 0907028401

Mengetahui,

Dekan

**Dr. Andi Jam'an SE., M.Si**  
NBM 0902116603

Ketua Progam Studi

**Mira, SE., M.Ak**  
NBM 1286844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : **Muhammad Irfan**, NIM : **105731118416** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 0014/SK-Y/62201/091004/2021 Tanggal 27 Jumadil Awal 1443 H/ 31 Desember 2021 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar SARJANA AKUNTANSI pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar,

Makassar, 27 Jumadil Awal H

31 Desember 2021 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag  
(Rektor Unismuh - Makassar)
2. Ketua : Dr. Andi Jama'an SE., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni SE., M. ACC  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji  
1. Dr. Andi Jama'an SE., M.Si  
2. Muchriana Muchran, SE, MSi., Ak  
3. ABD Saari, HE, SE, MSi., ACPA., CSP  
4. Mira, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. Andi Jama'an SE., M.Si**  
NBM 090211660



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Irfan**  
No. Stambuk/ NIM : 105731118416  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Skripsi : " Analisis sistim penerimaan kas pada kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang"

Dengan ini menyatakan bahwa :

*Skripsi Yang Saya Akan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Jumadil Awal H

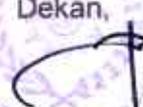
31 Desember 2021 M

Yang Membuat Pernyataan

  
**MUHAMMAD IRFAN**  
NIM: 105731118416

Diketahui Oleh:

Dekan,

  
**Dr. Andi Jam'an SE., M.Si**  
NBM 0902116603

Ketua Progam Studi

  
**Mira SE., M.Ak**  
NBM 1286844

## ABSTRAK

**Muhammad Irfan, 2021.** Analisis sistem penerimaan kas pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten Enrekang, Skripsi program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Muchriana Muhram dan Pembimbing II Samsul Rizal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sistem dan tata cara pelaksanaan penerimaan PAD dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pengurus kabupaten enrekang sudah memadai. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana data penelitian diperoleh dari beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan kas dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten enrekang sesuai dengan sistem dan prosedur yang terdapat dalam PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 penerimaan kas khususnya pajak dan retribusi daerah

**Kata Kunci :** *Sistem dan Prosedur, Penerimaan Kas, Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Pajak dan Badan Retribusi Daerah kabupaten enrekang , PAD.*



## ABSTRAC

**Muhammad Irfan, 2021.** Analysis of the cash receipts system at the regional revenue agency office of Enrekang district, Thesis of the Accounting study program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, Supervised by Advisor I Dr. Muchriana Muhram and Advisor II Samsul Rizal.

s study aims to analyze whether the system and procedures for implementing PAD receipts in the Management of Regional Taxes and Levies are adequate. The analytical method used in this research is descriptive qualitative, where the research data is obtained from several observations and direct interviews with related parties.

From the results of this study indicate that the system and procedures for cash receipts are carried out by the Regional Tax and Retribution Management Agency of Enrekang Regency in accordance with the systems and procedures contained in PERMENDAGRI 59 of 2007 cash receipts, especially local taxes and levies.

**Keywords:** Systems and Procedures, Cash Receipts, Regional Original Revenue, Tax Management and Regional Retribution Agency, Enrekang Regency, PAD.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas segala Rahmat dan Hidayah yang tiada hentinya diberikan kepada Hambanya. Salawat serta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya. Ini merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala dalam Penulisan Skripsi yang berjudul „analisis sistem penerimaan kas pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten enrekang

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Mansur s pd dan ibu yening yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, cinta, kasih sayang dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu juga dalam proses penyelesaian ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi ibadah juga cahaya penerang didunia dan diakhirat Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebanyak- banyaknya penulis sampaikan dengan hormat kepada ;

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag** selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak **Andi Jam,an SE**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK.CA.CSP**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu **Dr. muchriana muchran SE., M.Si. Ak. CA**, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak **Samsul rizal SE., MM** selaku pembimbing II yang telah berkenan membimbing dan membantu dalam penyusunan Skripsi Hingga Ujian Skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dan banyak menugiskan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan hingga akhir.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kedua Orang Tua dan adik-adikku, juga semua keluarga yang saya Cinta Karena Allah SWT, Terkhusus kedua Orang Tuaku Terima Kasih atas pengorbanan materi, Doa dan dukungan moral yang kalian berikan kepada ananda selama ini
9. Kepada Kantor badan pendapatan daerah kabupaten enrekang yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.

10. Teman terbaik Fifi Indriani yang selalu menyemangati, membantu, dan memberikan motivasi kepada penulis dari awal sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman kelas AK E 2016 yang selama ini telah menjadi teman baik dan mulai dari awal perkuliahan hingga penyelesaian akhir.

12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan semangat, dorongan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kepada semua pihak, penulis berharap adanya kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap, apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini mohon dimaafkan dan semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi diri saya Pribadi.

*Billahi fii Sabilillah Ya, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, Agustus 2021

MUHAMMAD IRFAN

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
JUDUL PENELITIAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	3
C. Tujuan penelitian .....	3
D. Teknik Analisis .....	3
E. Desain Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
A. Tinjauan teori .....	5
1. Sistem Penerimaan Kas .....	9.
2. Sistem Informasi Akuntansi .....	9
3. Langkah-langkah penyusunan sistem informasi akuntansi penerimaan kas.....	18
4. Sistem informasi akuntansi badan pendapatan daerah .....	19
5. bagan alir flowchart .....	22
B. Tinjauan Empiris .....	26
C. Kerangka Berpikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis penelitian .....	30
B. Fokus peneltian.....	30

C.	Lokasi dan waktu penelitian .....	30
D.	Sumber data .....	30
E.	Populasi dan sampel.....	31
F.	Teknik pengumpulan data .....	31
G.	Teknik analisis data .....	32
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>33</b>
A.	Gambaran umum dan objek penelitian .....	33
B.	Hasil Penelitian .....	38
C.	Pembahasan.....	55
<b>BAB VPENUTUP .....</b>		<b>56</b>
A.	Kesimpulan .....	56
B.	Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>58</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Bagan Flowchart .....	22
Peneltian Terdaulu .....	26



DAFTAR GAMBAR

Nomor

Halaman

Kerangka Konsep.....18



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Sistem informasi penerimaan kas merupakan informasi penting dalam mendukung kestabilan dalam penyelenggaraan sebuah perusahaan atau instansi. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, dengan adanya informasi diharapkan sistem dapat berguna bagi pemakai. Sistem itu sendiri adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem yang lama secara keseluruhan dikembangkan.

Dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan secara efektif dan efisien. Setiap perusahaan atau instansi dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas, kas diperlukan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru. Karena sifatnya yang sangat mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, kemungkinan terjadinya penyelewengan akan besar, maka perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kas. Mengingat proses penerimaan kas ini mengandung kerawanan adanya penggelapan serta penyelewengan kas maka setiap perusahaan harus mempunyai kualitas sistem informasi akuntansi yang baik dari segi pendidikan keahlian ataupun keterampilan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang memadai untuk dapat mengawasi penerimaan kas. Menurut Widjajanto mendefinisikan sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan,

menggolongkan, mengolah, menganalisa dan komunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor dan kreditor) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen). Oleh karena itu perlunya sistem informasi akuntansi terutama di kantor instansi atau pemerintah daerah. Pendapatan daerah merupakan penyelenggaraan dalam pendapatan pemerintah. Melalui pemerintah pendapatan daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Menurut pasal 1 angka 18 undang-undang nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran pendapatan asli daerah (PAD) untuk pendapatan berbagai cakupan sumber seperti dalam pasal 5 ayat (1) uu 33/2004 memberikan cakupan sumber pad yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pad yang sah. Adapun sumber pendapatan tersebut akan bersinergi dan menghasilkan pad yang mampu menunjang jalannya perekonomian di suatu daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan, pad juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, bahkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah. Maka dari itu perlunya sistem akuntansi keuangan dalam pendapatan daerah tersebut untuk mengelolah realisasi pendapatan asli daerah di daerah enrekang maka hal ini melatarbelakangi peneliti mengambil judul "**Analisis Sistem Penerimaan Kas Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Enrekang**".

## B. Rumusan masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu " Bagaimana sistem penerimaan kas di badan pendapatan daerah kabupaten enrekang"

## C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah "Untuk Menganalisis Sistem penerimaan kas Yang diterapkan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang"

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah

1. Secara teoritis hasil dari penelitian, hasil dari Penelitian sebagai referensi bagi yang berminat dalam Sistem penerimaan kas Yang diterapkan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang
2. Secara praktis, dari hasil penelitian juga dapat sumbangsi pemikiran tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang"

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan teori

##### 1. Sistem Penerimaan Kas

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dan penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan (Mulyadi, 2011:500). Selain itu sistem akuntansi penerimaan kas menurut (Gito Sudarmo, 2012:61) dapat diartikan juga sebagai proses aliran kas yang terjadi di perusahaan yang bersangkutan yang terdiri dari aliran kas masuk (cash inflow). Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang dimaksud sistem akuntansi penerimaan kas yaitu suatu jaringan prosedur yang menangani suatu peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penambahan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.

Penerimaan kas perusahaan dapat berasal dari dua sumber utama yaitu : penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Sistem akuntansi penerimaan kas dari kegiatan utama perusahaan tersebut dapat disendirikan apabila unsur-unsur pembentuknya seperti fungsi yang terkait, formulir yang digunakan, sistem otorisasi, catatan akuntansi, dan prosedur pelaksanaan transaksi.

Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dapat dibagi menjadi tiga prosedur berikut ini<sup>10</sup> :

- a) Prosedur penerimaan kas dari *overthecountersales*, perusahaan melaksanakan penyerahaan barang dan menerima kas dari penjualan di tempat usaha.
- b) Prosedur penerimaan kas dari *cashondelivery sales (COD sales)*,

perusahaa

- c) melaksanakan penyerahaan barang dan menerima kas dari penjualan di tempat pelanggan.
- d) Prosedur penerimaan kas dari *credit card sales*, penerimaan kas melibatkan pihak ketiga (bank atau perusahaan penerbit kartu kredit).

Penerimaan kas perusahaan dapat berasal dari dua sumber utama yaitu : penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Sistem akuntansi penerimaan kas dari kegiatan utama perusahaan tersebut dapat disendirikan apabila unsur-unsur pembentuknya seperti fungsi yang terkait, formulir yang digunakan, sistem organisasi, catatan akuntansi dan prosedur pelaksanaan transaksi. Adapun bentuk penerimaan kas yaitu :

Menurut PSAK No. 2, kas terdiri dari saldo kas, rekening giro, aset setara kas, investasi yang sangat mudah dituangkan tanpa mengalami resiko perubahan harga yang signifikan. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut: Cash, On Hand and Bank, Treasury Bills, Commercial Paper, Money Market Fund dan lain-lain. Menurut PSAK No. 2 setara kas adalah aktiva yang di miliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek bukan untuk dimaksudkan ke dalam investasi atau tujuan lain. Pos ini harus segera dapat di ubah menjadi kas dalam jumlah yang telah di ketahui tanpa perubahan nilai yang signifikan. Misalnya investasi surat berharga (saham/obligasi) yang akan segera dijual harus dijaga agar tidak terjadi kas menganggur atau sering disebut dengan *idle cash*.

Sifat dan Komposisi Kas Syarat yang dapat dimasukkan ke

dalam kas adalah sesuatu tersebut dapat diterima sebagai setoran oleh bank dengan nilai nominal, sehingga jika elemen-elemen yang tidak diterima sebagai setoran dengan nilai nominal, tidak dapat digolongkan sebagai kas. Adapun yang tergolong ke dalam kas adalah:

- a. Uang kertas dan uang logam
- b. Cek yang belum disetor
- c. Rekening Tabungan
- d. Uang kembalian
- e. Cek dan Bilyet Giro
- f. *Travelers Cek*, yaitu cek yang dikeluarkan khusus untuk perjalanan (Tourism/Bisnis)
- g. *Demand Deposit*, yaitu uang simpanan di bank yang sewaktu-waktu dapat diambil (berupa rekening giro)
- h. *Money Order*, yaitu surat penting membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan pengguna
- i. *Chaser Cek*, yaitu cek yang dibuat dalam bentuk bank untuk suatu perdagangan di bank itu juga.
- j. *Bank Draft* (wesel bank), yaitu cek atau perintah membayar dari suatu bank yang mempunyai rekening di bank lain, yang dikarenakan atas permintaan seseorang atau nasabah melalui penyetoran terlebih dahulu di bank pembuat.

Adapun sifat kas yaitu:

- a. Segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.

- b. Dapat digunakan segera. Artinya, apabila diminta dapat segera dikeluarkan. Adapun fungsi dari kas ialah
- c. Sebagai alat tukar atau alat bayar dalam jumlah besar / kecil.
- d. Alat yang diterima sebagai setoran oleh bank sebesar nilai nominalnya
- e. Kas juga digunakan untuk investasi baru dalam aktiva tetap.

#### Pengendalian Penerimaan Kas

Mengingat sifat-sifatnya, kas dalam perusahaan memerlukan perhatian yang cukup serius. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. Perencanaan arus kas
- b. Pengendalian penerimaan kas
- c. Pengendalian pengeluaran kas
- d. Melakukan rekonsiliasi bank
- e. Penerapan sistem dana tetap untuk kas kecil

Di dunia usaha dikenal beberapa bentuk pembayaran dari langganannya. Ada macam-macam bentuk penerimaan kas antara lain:

- a. Penerimaan berupa uang tunai
- b. Penerimaan berupa cek
- c. Penerimaan berupa giro Penerimaan berupa Transfer Bank

Cara Penerimaan Kas Adapun beberapa cara penerimaan kas, antara lain:

- a. Melalui penagihan

Penagihan dapat dilakukan baik oleh juru tagih perusahaan (*debtcollector*), maupun oleh bank.

b. Melalui transfer bank

Dalam hal ini pelanggan harus membayar kemudian melakukan pengiriman uang langsung ke rekening perusahaan.

Pelanggan kemudian mengirimkan fotocopy bukti transfer bank.

c. Melalui pembayaran langsung

Hal ini biasanya terjadi pada penjualan tunai yang menyediakan jasa kasir secara manual untuk melakukan transaksi

## 2. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi menurut Diana dan Setiawati (2011) adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Secara garis besar sistem informasi akuntansi terdiri dari delapan komponen yaitu (Krisniaji, 2015):

a. Tujuan. Setiap tujuan informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan.

b. Input Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input kedalam sistem. Sebagian besar input berupa data transaksi.

Namun, dalam perkembangannya sebuah sistem informasi akuntansi tidak hanya mengolah data dan menghasilkan informasi keuangan saja tetapi juga mengolah data dan menghasilkan informasi non keuangan. Oleh karena itu sebagian input adalah

berupa data non keuangan.

- c. Output Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem disebut output. Output dari sebuah sistem yang dimasukkan kembali kedalam sistem sebagai input disebut umpan balik (feedback). Output dari sebuah laporan internal seperti daftar umur piutang, anggaran, dan proyeksi arus kas.
- d. Penyimpanan data Data sering disimpan untuk dipakai lagi di masa yang akan datang. Data yang tersimpan ini harus diperbarui (update) untuk menjaga keterkinian data.
- e. Pemrosesan Data yang harus diproses untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen pemrosesan. Saat ini sebagian besar perusahaan mengolah datanya dengan menggunakan komputer, agar dapat dihasilkan informasi secara cepat dan akurat.
- f. Instruksi dan prosedur Sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur rinci. Perangkat lunak (program) komputer di buat untuk menginstruksikan komputer melakukan pengolahan data.
- g. Pemakai Orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem dengan pemakai. Dalam perusahaan, pengertian pemakai termasuk didalamnya adalah karyawan yang melaksanakan dan mencatat transaksi dan karyawan yang mengelola dan mengendalikan sistem. keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari

pengolahan rutin atas transaksi akuntansi (Rama dan Jones, 2011).

- h. Pengamanan dan pengawasan Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi harus akurat, bebas dari berbagai kesalahan, dan terlindung dari akses secara tidak sah.

Untuk mencapai kualitas informasi semacam itu, maka sistem pengamanan dan pengawasan harus dibuat dan melekat pada sistem. Sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen (Pelaku dan Sabijono, 2015):

- a. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
- b. Prosedur-prosedur baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
- c. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
- d. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
- e. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang menjalankan sistem harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung oleh infrastruktur teknologi seperti software, komputer dan peralatan pendukung lain :

Tanpa itu semua, sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik. Sistem informasi akuntansi merupakan komponen kunci dan pembuatan keputusan. Mempelajari sistem informasi akan membangun seseorang dalam memahami peran penting yang dimainkan oleh sistem informasi akuntansi dalam proses pembuatan keputusan. Pada dasarnya dalam sebuah organisasi ada tiga tingkatan keputusan yang dibuat, yaitu: Keputusan yang terstruktur, merupakan keputusan yang sifatnya repetitif (berulang), rutin,

dan mudah dipahami untuk didelegasikan kepada karyawan level bawah atau otomatisasi dengan komputer. Keputusan yang agak terstruktur, merupakan keputusan yang sebagian memiliki sifat terstruktur dan sebagian lagi memiliki sifat tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak sering terjadi dan tidak rutin, dan tidak ada pedoman (model) standar untuk membuat keputusan ini. Pembuatan keputusan ini lebih didasarkan pada intuisi atau judgement. Dalam membuat keputusan, seseorang juga terkait dengan tiga jenis kegiatan yang umum dilakukan oleh organisasi, yaitu: Pengendalian operasional merupakan kegiatan yang menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan oleh unit-unit organisasi.

Adapun beberapa fungsi sistem informasi akuntansi sebagai berikut (Paulus, 2016):

- a. Mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan. Suatu perusahaan agar tetap bisa eksis perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai

- a. Pembuatan laporan rutin untuk pihak internal dan eksternal, perusahaan menggunakan sistem informasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari para investor, kreditor, dinas pajak, badan pemerintah dan lain-lain.
- b. Pendukung utama aktivitas rutin suatu organisasi atau entitas, para pimpinan dan manajer membutuhkan sistem informasi untuk membantu aktivitas rutin suatu organisasi perusahaan. Pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi proses pengambilan keputusan pada setiap pelanggan yang paling banyak melakukan transaksi pembelian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
- c. Melaksanakan aktivitas perencanaan dan pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi diperlukan dalam proses perencanaan dan pengendalian. Pengendalian internal mencakup kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi aset kekayaan perusahaan dari kerugian korporasi dan memelihara keakuratan data keuangan perusahaan.

Tujuan sistem informasi akuntansi menurut (Mulyadi, 2017)

adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang

sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan panyajian maupun struktur informasi.

- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (riability) informasi akuntansi dan penyediaan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan komponen kunci dan pembuatan keputusan. Apabila sistem informasi akan membangun seseorang dalam memahami peran penting yang di mainkan oleh sistem informasi akuntansi dalam proses pembuatan keputusan. Pada dasarnya dalam sebuah organisasi ada tiga tingkatan keputusan yang di buat, yaitu: Keputusan yang terstruktur, merupakan keputusan yang sifatnya refentif (berulang), rutin, dan mudah di pahami untuk di delegasikan kepada karyawan level bawah, atau di otomasi dengan computer.

Keputusan yang agak terstruktur, merupakan keputusan yang sebagian memiliki sifat terstruktur dan sebagian lagi memiliki sifat tidak terstruktur.

Keputusan yang tidak terstruktur, merupakan keputusan yang tidak sering terjadi dan tidak rutin, dan tidak ada pedoman (model) standar untuk membuat keputusan ini. Pembuatan keputusan ini lebih di dasarkan pada intuisi atau judgement. Dalam membuat keputusan, seseorang juga terkait dengan tiga jenis kegiatan yang umum dilakukan oleh organisasi, yaitu Pengendalian opsional merupakan kegiatan

yang menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan oleh unit-unit organisasi Subsistem dari sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi dapat di selenggarakan secara manual (tanpa alat bantu computer), dapat sepenuhnya di manfaatkan teknologi computer dan teknologi informasi terbaru, atau dapat berupa kombinasi antara keduanya. Meskipun demikian pada umumnya sistem informasi akuntansi digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis keputusan ataupun sebagai pembuat keputusan yang terkait dengan transaksi-transaksi.

Komponen sistem informasi akuntansi Secara garis besar, sebuah sistem informasi memiliki delapan komponenyaitu

- 1) Tujuan setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan
- 2) Input data harus di kumpulkan dan di masukan sebagai input kedalam sebagian besar input berupa data transaksi. Namun dalam setiap perkembangannya sebuah sistem informasi tidak hanya Mengis data dan menghasilkan informasi keuangan saja, namun juga mengolah data dan menghasilkan informasi non keuangan.
- 3) Output, informasi yang di hasilkan oleh sebuah sistem disebut output.

Output dari sebuah sistem yang di masukkan kembali dalam sistem sebagai input disebut dengan umpan balik (feedback) . Output dalam sebuah sistem informasi akuntansi biasanya berupa laporan keuangan dan laporan internal seperti daftar umur, piutang, anggaran dan proyek arus kas.

- 4) Penyimpanan data, seing di simpan untuk di pakai lagi di masa mendatang.

Data yang tersimpan ini harus di perbaharui (*updated*) untuk menjaga keterkinian data.

- 5) Pemrosesan data harus di proses untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen pemroses. Saat ini sebagian besar pemerintahan mengolah data nya dengan menggunakan computer agar dapat di hasilkan informasi seacara cepat dan akurat.

- 6) Intruksi dan prosedur sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa intruksi dari prosedur rinci. Perangkat lunak (program) computer dibuat untuk mengintruksikan computer melakukan pengolahan data.

- 7) Pemakai orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan

informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut dengan pemakai.

Dalam perusahaan pengertian pemakai termasuk didalamnya adalah pegawai yang melaksanakan dan mencatat transaksi serta mengolah dan mengendalikan sistem

8) pengamanan dan pengawasan, informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem Informasi harus akurat. Bebas dari berbagai kesalahan, dan terlindung dari akses secara tidak sah. Untuk mencapai kualitas informasi seperti itu maka sistem pengamanan dan pengawasan harus dibuat dan melekat pada sistem



Gambar 2.1

Komponen sistem informasi akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem informasi perusahaan, sistem informasi ini merupakan suatu bagian informasi akuntansi merupakan suatu bagian sistem informasi akuntansi yang lebih banyak berhubungan dengan data keuangan. Menurut widjajahanto (2002):

Akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang mencakup kegiatan mengidentifikasi informasi ekonomi mengenai suatu organisasi sebagai pihak. Adapun pengolahan keuangan menurut sistem informasi akuntansi sebagai berikut :



Gambar 2.2

Pengolahan sistem informasi akuntansi

Langkah-langkah penyusunan sistem informasi akuntansi penerimaankas

Langkah-langkah dalam penyusunan sistem informasi ini (disebut juga dengan *system life cycle*) terdiri dari (baridwan, 2009):

- a. **Analisa Sistem** yang ada. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan sistem yang berlaku. Dalam prakteknya, analisa sistem ini dilakukan dengan mengadakan penelitian (survey). Apabila pekerjaan penyusunan sistem ini dilakukan oleh pihak luar (konsultan), penelitian pendahuluan ini diperlukan.
- b. **Merencanakan sistem akuntansi (System design)**. Langkah ini merupakan pekerjaan menyusun sistem yang baru, atau mengubah sistem lama agar kelemahan-kelemahan yang ada dapat dikurangi atau ditiadakan.
- c. **Penerapan sistem akuntansi**. Langkah ini adalah sistem akuntansi yang disusun untuk menggantikan sistem lama. Sebaiknya sistem baru ini dimulai penggunaannya pada awal periode akuntansi.
- d. **Pengawasan sistem baru (follow-up)**. Langkah ini adalah untuk mengawasi penerapan sistem baru, yaitu mengecek apakah sistem baru itu dapat berfungsi. Apabila ada kesalahan-kesalahan, maka selama masa pengawasan itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.

## 2. Sistem informasi akuntansi badan pendapatan daerah

Dalam PP no.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan mendefinisikan sistem akuntansi pemerintahan (sap) sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Menurut Abdul Halim dalam bukunya *akuntansi keuangan daerah* yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh *saptha empat* mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah daerah (sapd) sebagai sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Dari dua sudut pandang mengenai pengertian sapd di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

- a. Tujuan dan fungsi sistem akuntansi pemerintahan di bentuknya sistem akuntansi pemerintah daerah (sapd) memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk akuntabilitas, manajerial dan pengawasan yang hasil akhir dari siklusnya adalah informasi keuangan. Berikut penjelasan masing-masing tujuan

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas, yaitu sistem akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Lebih lanjut lagi, tujuan akuntabilitas ini mengharuskan tiap pegawai atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan atas laporan keuangannya.

b. Manajerial

Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.

c. Pengawasan

Akuntansi pemerintah harus memungkinkan diselenggarakannya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

**Pendapatan pajak daerah**

Mardiasmo (2003:98) menyatakan bahwa pajak daerah adalah: "pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah." Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah undang-undang no. 18 tahun 1997

tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.34 tahun 2000. adapun sumber-sumber pendapatan pajak daerah mardiasmo (2002:98) menyatakan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu

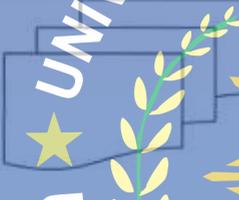
- 1) Pajak propinsi
- 2) Pajak daerah berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pajak propinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan pajak kabupaten/kota, terdiri atas
    - 3) Pajak hotel
      - (a) Pajak restoran
      - (b) Pajak hiburan
      - (c) Pajak reklame
      - (d) Pajak penerangan jalan
    - b. Pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan atau bangunan
    - c. Pajak galian golongan c
    - d. Pajak lain-lain dalam hal ini yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan pendapatan pajak daerah kabupaten pegawai atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien

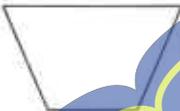
### 3. Bagan alir Flowchart

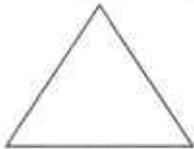
Bagan Alir (Flowchart) merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem (Krismiaji, 2015). Ada beberapa jenis-jenis Bagan Alir (Flowchart) antara lain (Krismiaji, 2015):

- a. Bagan Alir Dokumen (Document Flowchart) Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antar area pertanggungjawaban didalam sebuah organisasi.
- b. Bagan Alir (System Flowchart) Bagan Alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi.
- c. Bagan Alir Program (Program Flowchart) Bagan Alir program menjabarkan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan Alir Skematik (Schematic Flowchart) Bagan Alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur didalam sistem. Bagan Alir Proses (Process Flowchart) Bagan Alir yang banyak digunakan pada teknik industri. Bagan alir ini juga berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur.

Table 2.1 Bagan Flowchart

Gambar	Penjelasan
	<p>kumen : Simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi.</p>
	<p>kumen dan tembusannya : Simbol ini digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya.</p>
	<p>bagai dokumen : Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama di dalam paket.</p>
	<p>tatan : Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang sebelumnya di dalam dokumen atau formulir.</p>
	<p>nghubung pada halaman yang sama : Dalam menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan.</p>

	<p>nghubung pada halaman yang berbeda :</p> <p>Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman, simbol ini harus digunakan untuk menunjukkan, ke mana dan bagaimana bagan alir terkait satu dengan lain.</p>
	<p>giatan Manual : Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual.</p>
	<p>terangan, komentar : Simbol ini memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir.</p>
	<p>ip. sementara : Simbol digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen, digunakan simbol sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>= Menurut Abjad,</li> <li>= Menurut nomor urut.</li> <li>= Kronologis, menurut tanggal.</li> </ul>

	<p>simbol permanen : Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan tempat penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi bersangkutan.</p>
	<p>proses komputer : Simbol ini menggambarkan pengolahan data dengan komputer</p>
	<p>keputusan : Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data.</p>
	<p>arus line : Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data</p>
	<p>awal atau berakhir : Simbol ini untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi</p>



## B. Tinjauan Empiris

Berdasarkan pembahasan diatas adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Table 2.1  
penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
1	Yahya fika (2015)	Sistem retribusi Kualitatif parkir sebagai Fengawasan pendapatan daerah	Kualitatif	Penggunaan aplikasi Untuk membantu pengendalian data Dalam retribusi daerah sebagai pendapatan daerah
2	Syafarudin N Jasa (2017)	Kontribusi Pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah Enrekang	Kualitatif Dan kuantitatif	Hasil pendapatan daerah di enrekang mengalami penurunan
3	Andi ulfa Acyariana (2017)	Alam gunung nona terhadap Pendapatan asli daerah	Kualitatif	Kontribusi pendapatan Daerah di gunung nona 5 tahun belum maksimal

4.	Dul karim (2016)	Manajemen kebijakan desentralisasi fiscal dalam peningkatan pendapatan asli daerah	Kualitatif	Implementasi peningkatan asli daerah sudah terlaksana dengan baik
5.	Juanda jenifer poli, inggimar elim, mopusu ng (2018)	Analisis sistem prosedur dan penerimaan kas pendapatan asli daerah (pad) pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota kabupaten Enrekang	Kualitatif	Pelaksanaan retribusi pada kota kabupaten Enrekang telah sesuai dengan pemendagri 59 tahun 2017
6.	Raisa stephanie janis, jullieson dakh, harijiant osubijono (2015)	Analisis sistem dan prosedur penerimaan pad pada dinas pendapatan dan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Kualitatif	Pelaksanaan penerimaan pad kabupaten sitaru sudah selesai

### C. Kerangka Berpikir

Badan pendapatan daerah organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya.



Table 2.2 kerangka

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi data-data dengan membandingkan dengan menganalisis sistem informasi akutansi yang ada di instansi badan pendapatan daerah dengan berupa bukti laporan akutansi yang dikelola oleh instansi tersebut.

#### B. Fokus penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada sistem informasi akutansi di kantor badan pendapatan daerah kabupaten enrekang, yang pembahasannya tentang pelaporan keuangannya kas dalam sistem informasi.

#### C. Lokasi dan waktu penelitian

Badan pendapatan daerah kabupaten enrekang merupakan organisasi atau instansi di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab dalam penerimaan pendapatan daerah. Lokasi jalan pinang kabupaten Enrekang. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian kurang lebih bulanfebruari.

#### D. Sumber data

Bagian akutansi merupakan perolehan data dalam pencatatan keuangan dalam sistem informasi akutansi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi.

### E. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Jadi populasi tidak hanya berfokus pada orang, tetapi juga obyek lain. Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017).

Dari penjelasan di atas, populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan kantor pendapatan daerah tentang sistem informasi akuntansi dari penelitian adalah penerimaan kas pendapatan daerah.

### F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

#### 1. *Library research*

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kuliah, teori-teori dan literature lainnya yang sesuai.

#### 2. *Field research*

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui peninjauan secara cermat dan langsung dilokasi penelitian atau pengamatan langsung. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisa atas data yang telah dikumpulkan dari obyek penelitian.

### G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yaitu alat atau metode yang digunakan dalam rangka memecahkan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dari kantor pendapatan daerah enrekang. Adapun langkah-langkah teknik analisis data yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah

- a. Setelah mengumpulkan data atau dokumen yang diperlukan maka dilakukan analisa sesuai dengan teori-teori yang ada.
- b. Langkah-langkah dalam menganalisa yaitu: Menganalisis sistem informasi akuntansi pendapatan daerah
- c. Dalam penentuan sistem informasi pendapatan daerah yaitu sistem informasi penerimaan kas pendapatan daerah Menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum dan objek penelitian

##### a. Gambaran umum kantor badan pendapatan daerah

Penyediaan dokumen keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan kabupaten enrekang. Penerimaan daerah hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumber daya yang tersedia.

Prinsip good governance ini tentunya telah menjadi nilai-nilai universal dan sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kinerja bapenda kabupaten enrekang dimasa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance yang secara nyata dapat dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja bapenda kabupaten enrekang, salah satu aspek yang sangat penting adalah penyusunan rencana strategis (renstra).

Hal ini penting mengingat keuangan pembangunan menjadi lebih jelas dan diketahui oleh setiap stakeholders seperti dinas, badan, kantor, sekretariat daerah, DPRD, pengusaha, perguruan tinggi, lembaga-lembaga konsultan dan stakeholder lainnya. Keuangan pembangunan dimasa datang perlu lebih terpusat kepada bidang-bidang strategis, sehingga dapat memberikan hasil yang berarti dan meningkatkan

efisiensi penggunaan sumber daya. Keterkaitan dokumen rencana kerja (renja) bapenda kabupaten enrekang dapat dilihat rencana strategi

badan pendapatan daerah kabupaten enrekang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja (renja) tahunan bapenda.

Landasan hukum penyusunan renja bapenda kabupaten Enrekang. Sejumlah peraturan perundangan telah digunakan sebagai dasar hukum, antara lain:

1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat ii di sulawesi ( lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1022);
2. Undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retibusi daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5049);
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 224, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia indonesia nomor 5679);

4. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah ( lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4817) ;11

## b. Visi dan Misi

### 1) Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, ke mana dan Bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar Konsisten dan dapat eksis, antisipatif ,inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. dengan mengacu pada batasan tersebut, visi badan pendapatan daerah kabupaten Enrekang dijabarkan sebagai berikut:

### 2) Misi

Untuk memenuhi visi tersebut, dimunculkan misi. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam. Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki.

- b. Meningkatkan pengendalian pengelolaan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar Penatausahaan pengelolaan penerimaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Makna yang terkandung dalam masing-masing misi yang telah kami tetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. Misi pertama:**

"mendorong peningkatan pendapatan daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Enrekang. Untuk lebih meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka semua potensi yang ada harus dikelola dengan baik melalui sumber daya yang dimiliki oleh badan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang.

**b. Misi kedua:**

"mendorong terciptanya pengendalian pengelolaan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang, berkomitmen untuk meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi badan pendapatan daerah dalam rangka upaya terciptanya pengendalian pengelolaan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

**c. Misi ketiga:**

"mendorong terciptanya penatausahaan pengelolaan penerimaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk mewujudkan pengelolaan penerimaan keuangan daerah yang baik, maka diperlukan kapasitas pengelola yang memadai dalam rangka

melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian administrasi penerimaan keuangan daerah.

c. Struktur Organisasi



## B. Hasil Penelitian

### a. Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi dan PAD Lainnya

Sistem pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Enrekang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

#### 1. System Self Assesmen (pembayaran pajak sendiri)

Sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

#### 2. System Official Assesment

Sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumentasi lain yang dipersamakan

#### 3. System With Holding

Sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya. Objek Retribusi Daerah Objek Retribusi Daerah terdiri:

- a) Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta, Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi

### Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

- b) Jasa Usaha, yaitu Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Pengeinapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di air, Retribusi Penjualan Produk Usaha daerah
- c) Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: Retribusi Izin Mendirikan bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

d) Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dengan pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dengan penagihan retribusi, Sistem dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

1. Sistem Pemungutan Retribusi

Sistem pemungutan Retribusi Daerah adalah system official assessment, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## 2. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan Kepala Daerah. Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

### e) Cara Perhitungan Retribusi Terutang

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan mempertimbangkan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Hasil penerimaan hasil retribusi tertentu Kabupaten, sebagaimana diperuntukkan kepala desa. Peraturannya diatur dengan Perda Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut. Biasanya retribusi terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi X Tingkat Penggunaan Jasa

### f) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, Perusahaan Daerah, Deviden BPR-BKK dan Penyertaan

Modal Daerah kepada pihak ketiga (dalam Rupiah). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana yang dirincikan menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN,
3. Bagaimana laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

- a. Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:
- b. Bank Pembangunan Daerah (BPD)
- c. Perusahaan Daerah air Minum (PDAM)

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar, Tempat Hiburan/rekreasi, Vila, pesanggahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

Hasil pembahasan sumber penerimaan pendapatan asli daerah sumber penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten enrekang terdapat berbagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten enrekang. Sumber ini dari tahun ke tahun terdapat perubahan, ada yang ditambah sumbernya dan ada yang dihilangkan atau tidak lagi dipungut pajaknya karena tidak lagi memenuhi syarat untuk dipunguti atau sudah tidak adalagi objek pajaknya atau alasan lainnya. Berikut daftar sumber penerimaan pad kabupaten enrekang:

TARGET REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2019

Pendapatan asli daerah	Target Rp	Realisasi Rp
2	3	4
<b>Pajak daerah</b>		
Pajak hotel	36.502.000,00	18.431.500,00
Pajak restoran	103.040.000,00	103.062.740,00
Pajak hiburan	50.000.000,00	4.725.000,00
Pajak reklame	267.681.100,00	264.515.490,00
Pajak penerangan jalan	4.624.569.874,00	5.020.207.815,00
Pajak pertambangan dan batuan	3.000.000.000,00	1.652.254.119,00



7.	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	3.215.380.160,00	2.695.557.831,00
8.	Pajak BPHTB	920.000.000,00	764.452.225,00

	<b>Jumlah</b>	<b>12.247.173.134,00</b>	<b>10.523.206.720,00</b>
<b>B.</b>	<b>Retribusi daerah</b>		
1.	Retribusi pelayanan kesehatan	36.089.194.000,00	26.781.947.534,00
2.	Retribusi pelayanan pasar	1.137.330.000,00	1.093.913.000,00
3.	Ret. pengujian kendaraan bermotor	25.000.000,00	27.430.000,00
4.	Retribusi terminal	25.000.000,00	20.600.000,00
5.	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	22.000.000,00	22.125.000,00
6.	Ret. pengendalian telekomunikasi	150.147.000,00	40.993.000,00
7.	Ret. Jasa usaha (kebun raya)	55.000.000,00	48.320.000,00
8.	Ret. Pemakaman kekayaan daerah	979.070.000,00	695.658.546,00
9.	Ret. Tempat khusus parkir perhub	398.000.000,00	406.858.000,00
10.	Ret. Tempat rekreasi dan olahraga	400.000.000,00	280.000.000,00
11.	Ret. Penggantian benih ikan	200.000.000,00	184.160.000,00
12.	ndirikan bangunan (IMB)	270.350.000,00	268.808.103,00
13.	Retribusi izin trayek	3.000.000,00	2.160.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>39,754,091,000.00</b>	<b>29,922,973,183.00</b>

<b>C.</b>	<b>G.KEK.DAERAH YANG DI PISAHKAN</b>		
1.	Perusahaan daerah air- minum	100.000.000,00	100.000.000,00
2.	Bank pembangunan daerah (BPD)	16.641.119.760,00	16.641.119.760,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.741.119.760,00</b>	<b>16.741.119.760,00</b>

<b>D.</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		
1.	Alan barang milik daerah	1.638.000.000,00	136.000.000,00
2.	Jasa giro kas daerah	3.000.000.000,00	1.496.004.933,00
3.	Bunga deposito	9.000.000.000,00	585.169.632,00
4.	end. Denda keterlambatan pekerjaan (bidang hukum)	9.416.372.411,00	1.430.240.521,00
5.	Pendapatan dan pengembalian modal revolving (jasa)	67.141.726,00	0,00
6.	Dana kapitasi JKN pada FKTP	11.999.830.562,00	0,00
7.	atan dan pengembalian lainnya yang sah	31.109.761.527,00	3.532.927.909,55
	<b>Jumlah</b>	<b>203.715.876.014,00</b>	<b>3.947.415.086,00</b>

	<b>Jumlah</b>	<b>13,163,500,000.00</b>	<b>12,588,404,716.00</b>
<b>B.</b>	<b>Retribusi daerah</b>		
1.	Retribusi pelayanan kesehatan	32.602.651.736,00	32.811.795.382,00
2.	Retribusi pelayan pasar	1.360.000.000,00	907.307.500,00
3.	Ret pengujian kendaraan bermotor	30.000.000,00	27.040.000,00
4.	Retribusi terminal	27.500.000,00	17.956.000,00
5.	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	28.000.000,00	18.345.000,00
6.	Ret. pengendalian telekomunikasi	145.031.700,00	142.989.000,00
7.	Ret. jasa usaha (kebun raya)	60.500.000,00	41.660.000,00
8.	Ret. Pemakaian kekayaan daerah	1.197.300.000,00	491.335.000,00
9.	Ret. Tempat khusus parkir perhub	332.900.000,00	352.874.000,00
10.	Ret. Tempat rekreasi dan olahraga	417.000.000,00	161.500.000,00
11.	Ret. Penggantian benih ikan	170.000.000,00	230.930.000,00
12.	Andikan bangunan (IMB)	278.000.000,00	186.649.716,00
13.	Retribusi izin trayek	2.000.000,00	2.015.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36,650,883,436,00</b>	<b>35,392,396,598,00</b>
<b>C.</b>	<b>G.KEK.DAERAH YANG DI PISAHKAN</b>		
1.	Perusahaan daerah air minum	100.000.000,00	100.000.000,00
2.	Bank pembangunan daerah (BPD)	15.312.302.384,00	15.312.302.384,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.412.302.384,00</b>	<b>15.412.302.384,00</b>
<b>D.</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		
1.	Hasil penjualan barang milik daerah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00
2.	Jasa giro kas daerah	3.000.000.000,00	859.548.577,00

3.	Bunga deposito	4.500.000.000,00	1.245.623.294,00
4.	end. Denda keterlambatan pekerjaan (bidang hukum)	12.421.171.296,00	486.634.041,57
5.	Pendapatan dari pengembalian dana perkuatan modal /revolving (jasa)	10.000.000,00	0,00
6.	Dana kapitasi JKN pada FKTP	12.109.706.069,00	11.069.558.072,00
7.	atan dari pengembalian lainnya yang sah	17.942.186.660,00	3.100.711.505,39
	<b>Jumlah</b>	<b>52,183,064,025.00</b>	<b>15,374,729,943.00</b>

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan

## TARGET REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG

SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2020

No.	Pendapatan asli daerah	Target Rp	Realisasi Rp
1	2	3	4
A.	<b>Pajak daerah</b>		
1.	Pajak hotel	15.000.000,00	11.606.000,00
2.	Pajak restoran	150.000.000,00	473.923.065,00
3.	Pajak hiburan	10.000.000,00	5.375.000,00
4.	Pajak reklame	340.000.000,00	431.121.412,00
5.	Pajak penertakan jalan	5.000.000.000,00	4.952.554.757,00
6.	al bukan logam dan batuan	2.318.500.000,00	1.471.667.661,00
7.	Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	4.230.000.000,00	4.067.882.946,00
8.	Pajak BPHTB	1.100.000.000,00	1.174.273.875,00

#### d. Hasil Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dari kas pendapatan daerah dikabupaten Enrekang Fungsi yang terkait Fungsi yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari kas pendapatan daerah di kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian perencanaan dan pendaftaran pendapatan yaitu bagian yang tugasnya mendata dan penetapan besarnya pendapatan yang harus di setorkan.
- 2) Fungsi perantara yaitu bagian yang di beri tugas menghitung dan menyetorkan kas pendapatan daerah
- 3) Fungsi pemegang kas yaitu bagian yang bertugas menerima pembayaran pendapatan daerah yang menyetorkan pendapatan daerah dan atau menerima setoran dari setiap petugas perantara (mantri pajak) dari masing-masing pendapatan retribusi, pajak, dan pendapatan lainnya
- 4) Fungsi pembukuan pendapatan daerah yaitu bagian yang bertugas mencatat transaksi penerimaan kas dari sektor pajak ke dalam catatan akuntansi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Fungsi ini dipegang oleh bagian arsip.
- 5) Fungsi penyimpan kas daerah yaitu bagian yang bertugas menyimpan seluruh kas daerah yang berasal dari pendapatan daerah. Fungsi ini di pegang oleh bagian kas daerah.

Dokumen yang digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah di Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut.

- 1) Buku jurnal transaksi adalah catatan akuntansi yang berupa rekap jurnal transaksi yang digunakan bagian pembukuan untuk mencatat semua transaksi pendapatan daerah.
- 2) Buku kas umum adalah catatan akuntansi yang berupa buku besar yang digunakan bagian penerima setoran atau pemegang kas untuk mencatat penerimaan kas dari pembayaran pendapatan daerah.

Prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari sektor pajak daerah di Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- 1) Prosedur Pendataan dan Penetapan Pendapatan Prosedur pendataan dan penetapan pajak dilaksanakan oleh bagian pendataan dan penetapan pendapatan dibawah kepala seksi pendataan dan pendapatan pajak retribusi , dan pendapatan lainnya yang bertanggung jawab
  - (a) Mengata objek pendapatan.
  - (b) Mencatat hasil perekaman data pendapatan daerah dalam Surat Pemberitahuan Pendapatan Daerah (SPTPD).

- (c) Menghitung besarnya pendapatan daerah berdasarkan tarif masing-masing pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Menetapkan pajak daerah dalam bentuk Surat Ketetapan Pendapatan Daerah (SKPD).

Bagi wajib pajak yang membayarkan pendapatan daerah melalui petugas penagihan atau mantri masing-masing pendapatan daerah, SKPD nya rangkap 6, masing-masing diserahkan:

**Lembar 1** : Diserahkan kepada masing-masing pendapatan daerah.

**Lembar 2** : Diserahkan kepada mantri pendapatan daerah

**Lembar 3** : Diserahkan kepada bagian pembukuan

**Lembar 4, 5 dan 6** : Diserahkan kepada bagian bendahara pemegang Kas Untuk pendapatan daerah SKPD nya rangkap 3, masing-masing diserahkan.

**Lembar 1** : Diserahkan kepada pendapatan masing-masing pendapatan daerah.

**Lembar 2** : Diserahkan kepada bagian bendahara pemegang kas.

**Lembar 3** : Diserahkan kepada bagian pembukuan.

- 2) Prosedur Pembayaran pajak. Prosedur penagihan dilaksanakan oleh bagian penagihan yaitu mantri pendapatan daerah dan bagian bendahara pemegang kas di bawah kepala bidang pendapatan daerah, yang bertanggung jawab:

(a) Menarik pendapatan daerah yang membayarkan pajaknya melalui mantri pendapatan daerah.

(b) Menerima dan mengarsip SKPD lembar 2.

- (c) Bagian bendahara pemegang kas menerima pembayaran dari wajib. 6. Mengeluarkan Surat Setoran Pendapatan Daerah (SSPD) rangkap 3, yang masing-masing diserahkan:

**Lembar 1** : Diarsip di bagian bendahara pemegang kas.

**Lembar 2** : Diserahkan kepada wajib pendapatan Daerah.

**Lembar 3** : Diserahkan kepada bagian pembukuan.

- (f) Memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen SKPD lembar 4, 5 dan 6 beserta SSPD lembar 1.

- (g) Menyetorkan dan membuat Surat Setoran pendapatan (SSPD) sertamembuat laporan dalam buku kas umum.

- (h) Mengarsip SSPD validasi lembar 1 dan SKPD validasi lembar 4, 5 dan 6. 3)

Prosedur Pembukuan. Prosedur pembukuan dilakukan oleh bagian pembukuan di bawah kepala seksi pemungutan dan pembukuan pendapatan daerah, yang bertanggung jawab:

- (a) Menerima SSPD lembar 3 dan buku kas umum dari bagian bendaharapemegang kas dan SKPD lembar 3 dari bagian pendapatan.
- (b) Menerima buku setor kas daerah.
- (c) Membukukan transaksi dalam buku jurnal. Membuat laporan dengankomputer.
- (d) Terakhir, mengarsip SSPD lembar 3 dan SKPD lembar 3.

Prosedur Penerimaan pada Kas Daerah  
Prosedur kas daerah dilakukan oleh bagian kas daerah, yang bertanggung jawab:

- (a) Menerima Surat Setoran (STS) beserta sejumlah uang hasil penerimaan pendapatan daerah.
- (b) Mengitung jumlah setoran penerimaan pendapatan.
- (c) Mencatatnya dan kemudian mengeluarkan bukti setor berupa slip Ben26.
- (d) Membuat laporan pendapatan kas daerah.



### Flowchart Penerimaan Kas

#### a. Bagian perencanaan dan pendaftaran pendapatan



b. Bagian Keuangan (Pemegang Kas)



c. Bagian Penetapan dan Penerimaan



d. Bagian Pembukuan



Hasil analisis sistem dan prosedur penerimaan kas badan pengelola pajak dan retribusi daerah berwenang melaksanakan otonomi daerah kota untuk melaksanakan tugas desentralisasi, yaitu dalam tugas penerimaan kas: memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melakukan pemungutan dan/atau penerimaan sesuai peraturan perundang undangan. Prosedur sistem penerimaan kas:

- 1) Fungsi pihak terkait: ppk-skpd, pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bud (bank).
- 2) Dokumen: str, bukti transfer, nota kredit bank.
- 3) Catatan: buku jurnal penerimaan kas, buku besar dan buku besar pembantu
- 4) Prosedur pengguna anggaran memberikan skr yang sudah diterbitkan kepada Bendahara penerimaan dalam melaksanakan verifikasi penerimaan pendapatan. Sistem dan prosedur pajak dan retribusi
  - a) Prosedur penerimaan pajak daerah: pendaftaran wr daerah; penetapan; dan penyeteran
  - b) Prosedur penerimaan retribusi daerah: pendaftaran wr daerah; penetapan; dengan penyeteran

### C. PEMBAHASAN

Sistim akuntansi penerimaan kas merupakan sistim-sistim yang di gunakan untuk mencatat seluruh transaksi-transaksi penerimaan kas. Maka dari itu berdasarkan Permendagri No 21 Tahun 2011, dalam pelaksanaan penerimaan kas dengan dilakukan melalui prosedur menerima surat setoran (STS) yang di keluarkan dari BANK oleh bagian penetapan dan penerimaan dan di lanjutkan oleh bagian pembukuan. Karena itu peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem dan prosedur harus dirancang sedemikian rupa dan secara hati-hati supaya ketentuan satu dengan yang lainnya dapat saling berkesesuaian secara efektif dan efisien.

Bagian ini penulis akan mencoba menganalisis sistem penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang khususnya bagian keuangan Bendahara Penerimaan apakah penerimaan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang teruang dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011, ataukah belum. Analisis tersebut ialah analisis terhadap sistem akuntansi penerimaan kas.

Merunut penelitian yang didapatkan di lapangan, melalui wawancara dengan sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor DISPENDA Kabupaten Minahasa Tenggara yang selanjutnya di setor ke rekening kas umum daerah. Dengan mekanisme pembayaran untuk PBB-P2 dikumpulkan oleh masing-masing langsung ke Bendahara Penerimaan. Jika disesuaikan dengan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Pasal 308 dan pasal 309 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka hasil temuan yang didapatkan dari peneliti. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan sistem dan prosedur penerimaan melalui Bendahara Penerimaan dengan sistem dan prosedur penerimaan daerah melalui Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

1. Pengguna anggaran menyerahkan SKP Daerah kepada wajib pajak dan bendahara penerimaan.
2. Wajib pajak membayarkan uang kepada Bendahara Penerimaan sejumlah yang tertera di SKP Daerah.
3. Bendahara Penerimaan memverifikasi uang yang diterimanya dengan SKP Daerah dari pengguna anggaran.
4. Jika sesuai maka Bendahara Penerimaan membuat dokumen STS dan Surat tanda bukti pembayaran / bukti lain yang sah.
5. Bendahara Penerimaan menyerahkan surat tanda bukti pembayaran/ bukti lain yang sah kepada wajib pajak dan STS beserta uang kepada bank.
6. Bank mengotorisasi STS dan menerbitkan nota kredit. Bank mengembalikan STS bendahara Penerimaan. Nota kredit disampaikan ke BUD.

Dengan demikian sistem penerimaan kas pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten Enrekang sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari sistem prosedur penerimaan kas, dokumen yang digunakan sudah sesuai dengan standar peraturan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur penerimaan kas yang sistematis dan sesuai SOP yang diterapkan dalam peraturan pemerintah, namun ada yang mesti harus ditingkatkan regulasi di bapenda yang penting harus diterapkan yaitu peningkatan sistem informasi

akuntansi dari segi sistem penerimaan kasnya harus lebih ditingkatkan secara komputerisasi sehingga masyarakat bisa mengakses segala pengetahuan tentang prosedur penerimaan kas yang diterapkan di badan pendapatan daerah kabupaten Enrekang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menganalisis sistem akuntansi penerimaan kas di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten enrekang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penerimaan kas di badan pendapatan daerah kabupaten enrekang sesuai prosedur penerimaan kas badan pengelola pajak dan retribusi daerah berwenang melaksanakan otonomi daerah kota untuk melaksanakan tugas desentralisasi, yaitu dalam tugas penerimaan kas: memungut dan/atau menerima pendapatan daerah yaitu melakukan pemungutan dan/atau penerimaan sesuai peraturan perundang undangan.
2. Dalam hal prosedur penerimaan kas berupa Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang sah telah dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang disarankan dalam peraturan perundang-undangan.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian, yang menjadi saran dari peneliti adalah:

1. Badan Pendapatan Daerah perlu melaksanakan pelatihan / pendidikan teknis kepada pegawai-pegawainya, untuk mengetahui kurangnya SDM pegawai dibidang pengelolaan keuangan daerah
2. Agar bapenda kabupaten enrekang bisa menyediakan Informasi melalui Internet agar mudah di akses masyarakat dan informasi yang didapatkan bisa lebih mudah.

Karena minimnya informasi mengenai sistem dalam akuntansi pemerintah, untuk

penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang berhubungan, seperti sistem pengeluaran kas, sistem pengadaan persediaan dan aset, yang dapat memberikan manfaat lebih lanjut mengenai /sistem akuntansi yang berhubungan dengan pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Masrura (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Kota Medan. (Online) <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM/article/view/487/438>
- Baridwan, Z. (2009). Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Edisi
- Diana, A., & Setiawan, L. (2017). *Akutansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta: CV Andi Offset. Fenny Syafariani, Evi Feryani (2012). Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (online). <https://www.neliti.com/id/publications/281136/pengaruh-penerapan-sistem-informasi-akuntansi-terhadap-akuntabilitas-pendapatan>
- Gs Lantang (2016) Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (online) <https://docplayer.info/47778110-A-analisis-sistem-akuntansi-penerimaan-kas-pada-dinas-pendapatan-daerah-kabupaten-minahasa-tenggara.html>
- Jasa Syarifuddin (2017). Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah Enrekang. (online) <http://eprints.umri.ac.id/40124/>
- Jenifer Juanda, p : elimingriani dan pusungrudi. (2018). Analisis sistem prosedur dan penerimaan kas pendapatan asli daerah (PAD) pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota kabupaten Enrekang (online) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21808>
- Kamiarji. (2015). Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM
- Karim Abdul. (2016). Kontribusi alam gunung nona terhadap pendapatan asli daerah (online) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2195/>
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Nuh, M., & Hamizar. (2014). *Intermediate Accounting* (4 ed.). Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia. Nurazila (2018). Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada Pendapatan Jasa Rawat Inap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Kabupaten Enrekang. (Online) <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.

Sr Tambe. 2018. pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Dan Dinas Pendapatan Daerah Kalabahi Kabupaten Alor (online). <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/77>

Stephanie Raisa, sondakhjullie, dan subijonoharijianto. (2015). Analisis sistem dan prosedur penerimaan PAD pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten sitaru. (online) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7552/7104>

Vikasari Cahaya. (2016). Sistem Retribusi sebagai pengawasan pendapatan asli daerah kabupaten Cilacap ditinjau dari Kantor pendapatan kabupaten Cilacap). (online) <https://teknosifit.unand.ac.id/index.php/teknosifit/article/view/621>

Zulaila Decy Hendarsyah (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung (online) <http://ejournal.polibeng.ac.id/index.php/jakp/article>





**WAWANCARA  
MENGENAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS  
PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Data Responden**

**Nama** :  
**Jabatan** : Kepala Keuangan  
**Umur** : 34 Tahun

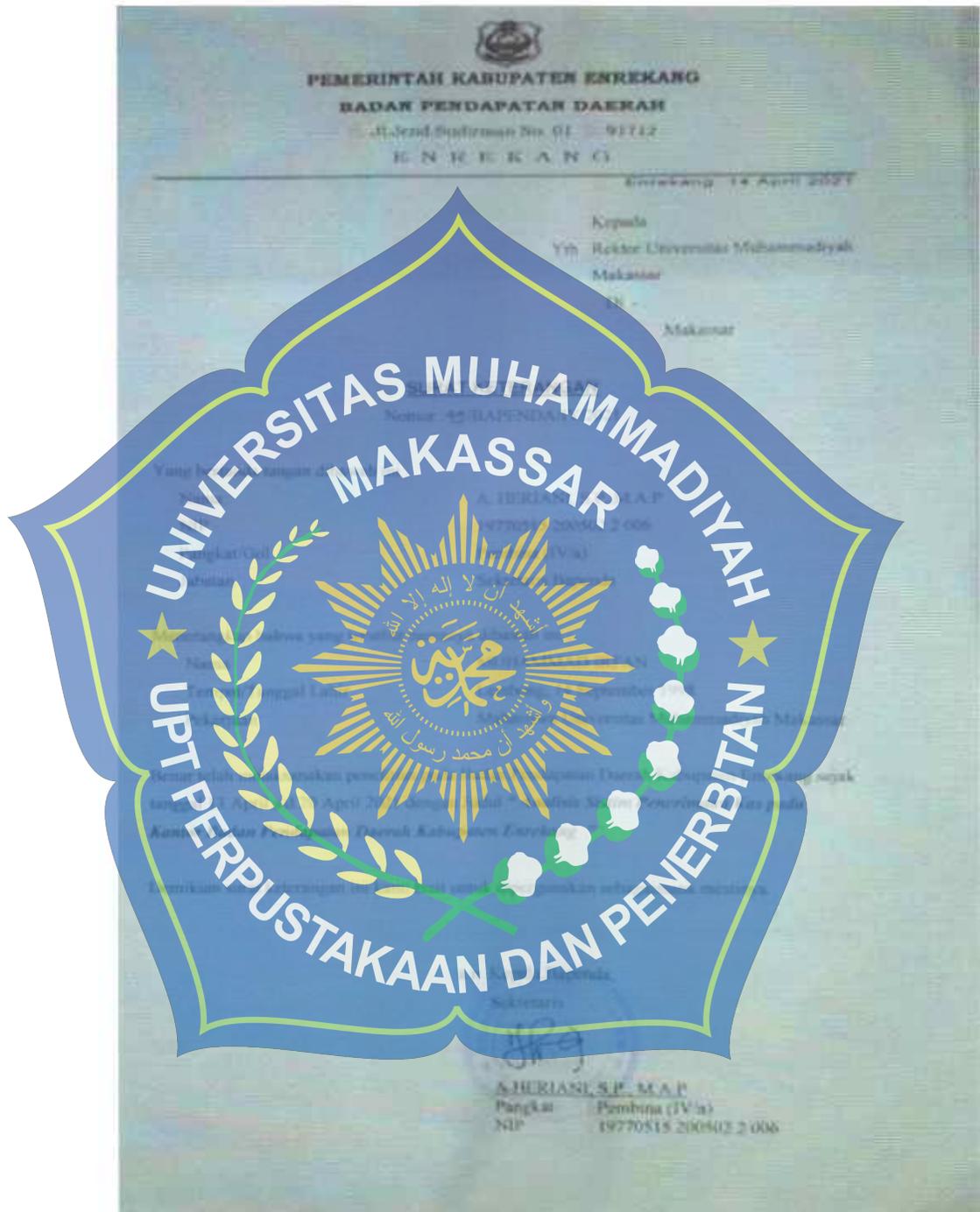
No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	Mekanisme penyusunan perencanaan APBD di Kabupaten Enrekang	Mekanisme RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, renja, ini semua sesuai dengan ini semua, sesuai dengan peraturan, Permendagri
2	Tentang indikator dan alat ukur transparansi perencanaan	Ya, mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan transparansi proses perencanaan. Ya ini kan setiap...setiap prosesnya kan ada musrembang, dan sebagainya itu kita, misalnya kita umumkan, eeh maksudnya seperti rancangan awal, kemudian rancangan RKPD, rancangan, kemudian nanti..nanti RKPD-nya kan semuanya diupload di web to.. Prosesnya juga itu..kita lakukan misalnya musrembang kan kita juga menghadirkan semua stakeholder yang apa..yang berperan di kegiatan, jadi tidak hanya instansi pemerintah tapi ada juga LSM, kemudian eeh organisasi ormas, organisasi massa, organisasi keagamaan, itu juga kita

		undang semua.
3.	Aplikasi itu dikelola di bidang mana bu?	Di sini, iya di bidang sini. Di aplikasi "RencanaKu" itu ada form usulan masyarakat gitu loh. Kemudian di musrembang sendiri itu kan ada juga usulan dari masyarakat kan pada saat musrembang kecamatan itu. Itu ada usulan dari masyarakat. kemudian di DPRD itu sudah membuat sistem aplikasi namanya "AspirasiKu". Nah itu semua yang warga masyarakat yang ingin mengajukan usulan atau mungkin keluhan gitu, bisa lewat "AspirasiKu" itu.
4.	setiap informasi yang sudah dibuka ke publik itu sudah dilaporkan kemana saja? Prasudurnya gimana? Apa memang semata-mata hanya untuk dipublikasikan? Bisa jadi kan yang dilaporkan ke atasan berbeda dengan yang dipublikasikan? Lalu kalau ada pegawai yang melakukan penyelewengan itu apa ada juga mekanisme pelaporannya? Misalnya masyarakat tahu itu dan dia harus melapor kemana	Kalau pelaporan itu ada form aduan yang dikelola oleh Diskominfo. Itu kan ada. Ada juga setiap hari kamis pagi itu kan Bupati kan ada forum, namanya "forum kamisan" itu beliau menyediakan waktu dari jam 6 pagi sampai jam 9 atau jam 10, menerima warga masyarakat. Bupati atau wakil bupati, hari kamis pagi. Tapi kalau mau kesana biasanya ini dulu ya mas, daftar dulu. Eehh.. eeh karena kan kadang bupati dan wakil, kadang bupati saja, kadang wakil bupati saja beserta staf ahli biasanya atau asistennya. Nah nanti dari forum kamis pagi itu kan ada keluhan-keluhan dari warga masyarakat tentang apa saja. Itu terus nanti ada, kan ada yang nyatet ya, di-feedback-kan ke SKPD, misalnya jalan rusak,

	gitu? Ada prosedurnya?	itu nanti disampaikan ke mana...ke dinas PU, dan biasanya di sini juga dapat tembusan
5.	Itu daftar forum kamisan itu dimana?	Eehh di <i>front office</i> , tapi itu daftar dulu. Di <i>front office</i> di kantornya Bupati. Soalnya takut kalau terlalu banyak, apa waktunya terbatas. Tapi tetap dibuka selain itu Bupati juga ada acara "Bupati Menyapa", itu lewat RRI dan biasanya jumat pagi, tapi saya gak hapal ya jam berapa. Jumat pagi-pagi itu disiarka di radio, biasanya ada yang telepon.
6.	Menurut pendapat ibu, apa definisi transparan dalam konteks perencanaan?	Ya masyarakat tahu apa yang kita bangun, apa yang kita rencanakan, itu aja sih. Dan masyarakat juga banyak atau memberikan usulan tentang apa yang mereka butuhkan.
7.	Kalau informasi itu dibuka lewat website, apakah masyarakat yang mengakses langsung paham ya bu? Atau disediakan khusus keterangan dan penjelasan di web itu?	Gak sih. Sepertinya tidak disediakan penjelasan khusus. Tapi dengan bahasa yang sederhana, mereka kan tahu. Bahasa perencanaan kita juga bukan, maksud artinya yang muluk-muluk. Kita mencoba dengan bahasa yang sederhana. Jadi langsung gampang dimengerti.
8.	Bagaimana masyarakat mengetahui bahwa informasi itu diberikan jujur kepada masyarakat?	Selama ini yang kita informasikan apa yang ada. Iya...yang gak jujur yang gimana? Kurang paham nih
9.	Kalau usulan masyarakat lewat musrembang itu, bagaimana mereka tahu	Di ini..di ini tadi, di dokumen-dokumen yang tadi, yang kita upload itu, kan jadi kelihatan to.. jadi besok di akhir, di rancangan, eehh di

	<p>usulan mereka diterima atau ditolak? Itu diinformasikan juga?</p>	<p>dokumen RKPD yang akhir itu kan ada kegiatan, kegiatan yang belum, yang ditunda pelaksanaannya, yang belum disepakati mungkin karena kan keterbatasan anggaran, nah itu kan tidak semua kebutuhan, kadang kan masyarakat itu usulannya kan banyak sekali sementara kemampuan anggaran kita terbatas. Itu kan dimana-mana pasti ada yang constrain anggaran kayak gitu. Itu di...tunda pelaksanaannya atau untuk tahun ini belum bisa dilaksanakan. Kan itu bisa dipergunakan untuk rancangan tahun berikutnya. Dokumen tertulisnya juga ada, nanti bukunya juga ada, buku kayak gini (sambil menunjuk kumpulan buku di sampingnya). Nah ini untuk yang sudah disepakati. Nah ini yang ditunda. Dua-duanya kita upload. Kita upload satu buku.</p>
<p>10</p>	<p>Apakah ada mekanisme yang menjamin bahwa standar perencanaan telah terpenuhi dan apa ada juga mekanisme apabila standar tersebut tidak terpenuhi?</p>	<p>Iya..iya. pengendalian dan evaluasi kan sesuai permendagri 86 itu kan, pengendalian dan evaluasi dilakukan di setiap tahap. Jadi misalnya pada saat penyusunan rancangan awal RKPD itu pengendaliannya bagaimana. Rancangan itu di bidang pengendalian nanti yang lakukan itu.</p>

# Surat Balasan



**Dokumentasi**

**Kantor Badan Pendapatan Daerah Enrekang**



## Turniting/ Paligiasi

Muhammad Irfan 105731118416

### ORIGINALITY REPORT

**23%**

SIMILARITY INDEX

**23%**

INTERNET SOURCES

**7%**

PUBLICATIONS

**10%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id	4%
2	repo.iain-tulungagung.ac.id	4%
3	etheses.uin-sulawesi.ac.id	3%
4	digilib.administrator.uin-sulawesi.ac.id	2%
5	Submitted to Universitas Jember	1%
6	repositori.uinsu.ac.id	1%
7	ejournal.uin-sulawesi.ac.id	1%
8	Submitted to Universitas Diponegoro	1%
9	repository.uinjkt.ac.id	1%

10	id.123dok.com	1 %
11	repository.radenintan.ac.id	1 %
12	penalaran-unm.org	1 %
13	repository.president.ac.id	1 %
14	e-jurnal.stenobel-indonesia.ac.id	1 %
15	noanano	1 %



## RIWAYAT HIDUP'



**Muhammad Irfan**, dilahirkan di Lembong Kabupaten Enrekang pada tanggal 14 September 1998. Anak pertama dari pasangan Ayahanda Mansur S.Pd dan Ibunda yenang. Mulai mengenal pendidikan tahun 2005 di SDN 70 Lembong dan tamat tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 6 ENREKANG dan tamat pada tahun 2013. Pendidikan Menengah Atas pada tahun 2013 di SMA Negeri 1 ENREKANG dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2021 dengan gelar (S.Ak).



